

## Bab 4

### PENUTUP

Semenjak berakhirnya kekuasaan Orde Baru (negara) akibat desakan arus liberalisasi, ruang-ruang publik di tanah air mulai menampakkan dirinya. Namun kuatnya arus liberalisasi tersebut, justru membuat ruang-ruang publik kembali “tercengkram” di bawah kendali kekuasaan regulasi pasar. Kekuasaan logika pasar inilah yang kemudian banyak mengooptasi keberadaan ruang-ruang publik kontemporer di Indonesia.

Di Makassar, ruang publik Phoenam tampil sebagai *trendsetter* dan representasi ruang publik kontemporer Makassar. Ruang publik Phoenam ini mewadahi berbagai pertarungan kepentingan yang terlibat di dalamnya seperti radio Mercurius, harian Fajar, Phoenam, tokoh-tokoh publik, dan pengunjung/komunitas Phoenam. Tiap-tiap elemen publik ini secara politis dan ideologis mengooptasi dan memodifikasi ruang publik Phoenam, dan masing-masing melakukan “perang posisi” (*war of position*) untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing menuju hegemoni.

Mercurius misalnya, perang posisi Mercurius berdampak kepada komodifikasi dan marginalisasi ruang publik Phoenam untuk kepentingan hegemoninya menuju media unggulan. Demikian pula dengan Phoenam, koalisi strategis bersama Mercurius dan komunitas Phoenam mempermudah jalan bagi Phoenam menuju bisnis warung kopi yang memiliki “*brand*” di Makassar. Koalisi strategis tersebut

berdampak kepada kapitalisasi dan komersialisasi ruang publik Phoenam sebagai ruang untuk mendapatkan keuntungan. Media Fajar pun mengonstruksi realitas dalam pemingkaiannya sendiri, dengan membangun konsensus bersama tokoh-tokoh publik agar memperoleh “nilai berita” terhadap realitas konstruksinya. Ekonomi politik media Fajar tersebut dilakukan dalam rangka menuju hegemoni media terdepan di ruang publik Phoenam. Sedangkan bagi tokoh-tokoh publik, ruang publik Phoenam merupakan ruang pencitraan diri dan konstruksi realitas politik untuk memperoleh penerimaan publik (*public consent*) dan opini publik (*public opinion*) atas hegemoni yang tengah diperjuangkan, dan hal tersebut memerlukan negosiasi-negosiasi strategis dengan elemen publik lain, termasuk dengan pengunjung Phoenam. Kehadiran pengunjung dan komunitas Phoenam di ruang publik Phoenam turut “meramalkan” pertarungan kepentingan tersebut. Dengan perjuangan kultural dan politisnya, para pengunjung dan komunitas Phoenam membentuk koalisi strategis agar jalan mendekati hegemoni dapat dengan mudah diraih.

Dari wacana-wacana yang mengemuka menjadi perbincangan publik, wacana politik elitlah yang paling dominan dan sering dibicarakan di dalam ruang publik Phoenam. Demikian pula akses publik di ruang publik Phoenam, pejabat publik dan intelektual merupakan tokoh-tokoh yang dominan mendapat akses di ruang publik Phoenam. Konsekuensi logis dari hal tersebut ialah tersingkirnya kelompok-kelompok minor dari perbincangan publik Makassar sehingga kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki kesempatan menampilkan dirinya, dan akhirnya akan tetap “terpinggirkan” dalam berbagai aspek kehidupan akibat terbatasnya peluang mereka.

Melihat kompleksitas pertarungan kepentingan pribadi/kelompok di ruang publik Phoenam, dan dominannya komunikasi wacana elit politik, serta terbatasnya akses komunikasi publik secara luas dan adil di ruang publik Phoenam, maka hal-hal tersebut dapat mempengaruhi derajat kepublikan ruang publik Phoenam dalam memediasi aspirasi dan kontrol publik terhadap penyelenggaraan kekuasaan (pemerintahan). Oleh karena itu, kondisi-kondisi ruang publik Phoenam Makassar masih jauh dari kondisi-kondisi ideal sebagai suatu ruang publik politis, yang derajat kepublikannya cenderung kepada ruang publik tidak otentik sebab kondisi-kondisi yang berlangsung tidak lagi berjalan secara kritis, rasional, tanpa tekanan, egaliter, dan inklusif, melainkan dikooptasi dan dikomodifikasi oleh para elit politik, ekonomi, dan media, untuk kepentingan-kepentingannya masing-masing.

Dengan demikian, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi-kondisi ruang publik Phoenam di Makassar dewasa ini, maka hal tersebut dapat memberi gambaran bagaimana perubahan prinsipil terjadi dalam konsepsi nilai-nilai budaya politik publik di Sulawesi Selatan, dari ruang kultural tradisional ke ruang publik kontemporer. Jika pada ruang kultural *tudang sipulung*, kondisi-kondisi ideal seperti *ada tongeng* (kebenaran), *lempu'* (kejujuran), *getteng* (ketegasan), *sipakatau* (saling menghargai), yang kesemuanya bermuara pada konsepsi *Siri' na Pacce* (harga diri dan kehormatan) sebagai “roh” penggerak pola pikir dan prilaku budaya politik masyarakat, menjadi dasar rasionalisasi dalam berpikir dan bertindak dalam budaya politik Bugis Makassar, maka dalam konteks ruang publik Phoenam kontemporer di era mediasi saat ini, faktor komodifikasi dan

ekonomi politik menjadi logika dan dasar rasionalisasi pertarungan kepentingan masing-masing elemen publik di ruang publik Phoenam, sehingga yang tersisa (hanyalah) adalah kepentingan publik yang telah terdistorsi untuk kepentingan pribadi/kelompok. Tradisi “duduk bersama” (*tudang sipulung*) sebagai warisan dan kearifan budaya lokal, hanya menjadi slogan dan argumentasi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan ideologis masing-masing pihak menuju hegemoni di ruang-ruang publik di Makassar. Hal tersebut (dapat) menjadi salah satu gambaran budaya politik kontemporer yang tengah berkembang di Makassar maupun di tanah air dewasa ini.

Dari hasil penelitian ruang publik Phoenam ini, pendekatan Habermasian ternyata belum cukup “menjanjikan” untuk menjawab berbagai kompleksitas permasalahan ruang publik dalam konteks kekinian. Perspektif Habermasian yang mengandaikan tindakan komunikatif yang bebas dan setara, sepertinya menjadi suatu utopia komunikasi sebab sangat sulit membayangkan suatu tatanan masyarakat dalam konteks masa kini yang *betul-betul* setara, baik secara ekonomis, politis, maupun kultural.

Oleh karena itu, dengan semangat *cultural studies*, kehadiran hasil penelitian ini *hanyalah* sebetulnya kritik terhadap kondisi budaya politik kontemporer yang melanda budaya politik Indonesia secara umum dan di Makassar secara khusus. Sekaligus kritik terhadap pendekatan Habermas mengenai ruang publik di era kapitalisme kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini masih jauh dari kata “selesai” dan “sempurna” mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya untuk

mengeksplorasi lebih jauh persoalan ruang publik ini. Untuk itu, diharapkan untuk penelitian-penelitian berikutnya dapat menjangkau ruang-ruang publik yang lain, yang tidak hanya terbatas pada ruang publik Phoenam saja, tetapi juga pada ruang-ruang publik yang lain, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih realistis dan “membumi”, agar penjelasan komprehensif mengenai budaya politik kontemporer dapat diperoleh lebih lengkap.

Hal yang menarik pula yang belum sempat terjangkau dalam penelitian ini adalah pertarungan wacana antar ruang publik ala warung kopi sebab dari pengamatan umum penulis, tiap-tiap ruang publik ala warung kopi di Makassar mencoba untuk menampilkan dirinya secara “berbeda” dari yang lain, baik dari segi segmen pengunjungnya, kontestasi wacana yang berkembang, maupun dari keterlibatan media dan tokoh-tokoh publiknya. Hal tersebut akan sangat menarik jika menjadi bahan penelitian berikutnya.

Demikian pula penelitian mengenai *tudang sipulung* sebagai ruang kultural Bugis Makassar, kiranya perlu penelitian yang lebih mendalam dan aplikatif, bagaimana “membangkitkan” tradisi yang sudah beratus tahun lamanya, dalam konteks budaya politik kontemporer, tanpa menghilangkan esensi *tudang sipulung*, dan juga tanpa menafikan kondisi-kondisi *real* budaya politik kontemporer. Hal terakhir yang juga menarik untuk diteliti adalah bagaimana perubahan peran dan fungsi warung kopi dari zaman ke zaman, dari zaman penjajahan, kemerdekaan, orde baru, hingga reformasi saat ini.